

Pentingnya Analisa Jaringan Sosial dalam Menelusuri Budaya Menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan

A. Josias Simon Runturambi
Pengajar Departemen Kriminologi FISIP UI
simonrbi@yahoo.com

Abstract

This paper describing problem and culture deviance inside the correctional institution. It is difficult to point out at one cause only. Social network analysis is fundamental in exploring imprisonment within correctional institution. Formal and informal social network occurs depending on reciprocity and proximity principals in the context of surviving in correctional institution. Social life within correctional institution nowadays is considered as social dynamic arena, not traditional punishment institution

Keywords: *Social Network, Deviance Culture, Correctional Institutio*

Perhatian serius dan sorotan publik kembali ditujukan pada keberadaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia atas berbagai peristiwa pembakaran, kerusuhan, pelarian, peredaran narkoba yang terjadi belakangan di beberapa lembaga pemasyarakatan (Lapas). Bukan kebetulan berbagai peristiwa ini melebar dan meluas tidak saja di Lapas dan rumah tahanan (Rutan) di kota besar tapi juga tempat terpencil.

Meningkatnya kejadian penyimpangan di Lapas dan Rutan diresponi cepat oleh pihak pemerintah dengan mengadakan razia dan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan

langsung oleh Menteri Hukum & HAM RI, diikuti tes-urine oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN), kunjungan Menko Polhukam RI ke beberapa Lapas, dan respon cepat lain secara serentak dan mendadak. Tapi respon cepat terhadap berbagai kejadian menyimpang di Lapas tidak membuat kasus pelanggaran di Lapas berkurang, sebaliknya bertambah dan meledak di beberapa Lapas lain seperti pelarian besar-besaran narapidana dan tahanan di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru awal Mei 2017 yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan saat ini berimbas pada permasalahan mendasar dalam kehidupan sosial di Lapas. Peningkatan jumlah tindak pidana memberi akibat meningkatnya isi Lapas terutama di kota-kota besar dan sekitarnya. Persoalan krusial mengelilingi lembaga pemasyarakatan mulai dari kapasitas berlebih (*overcapacity*), kesehatan, penyakit, makanan, pinjam-meminjam, pemukulan, keributan, perkelahian sampai pembangkangan.

Menelusuri persoalan ini secara umum menimbulkan pernyataan tentang Lapas sebagai institusi yang rentan terhadap berbagai pelanggaran, baik bersifat kelembagaan ataupun individual. Berita-berita di media massa berulang kali mengangkat citra buruk Lapas dan beragam kekerasan di dalamnya sampai tuduhan Lapas adalah sarang penyimpan dan peredaran narkoba "paling aman" dibanding tempat di luar Lapas. Pola dan proses terjadinya pelanggaran atau penyimpangan di dalam Lapas terus berulang disuarakan pemberitaan media cetak maupun sosial secara beruntun, terutama kebiasaan atau budaya menyimpang dalam Lapas.

Memahami lembaga pemasyarakatan dan berbagai bentuk hubungan menyimpang didalamnya tidak mudah, sangat sulit bila hanya mengandalkan satu penyebab tunggal melihat fenomena ini. Sangat naif pula bila persoalan tersebut hanya diselesaikan dengan memperbaiki sarana dan prasarana saja atau hanya menyalahkan inkonsistensi kebijakan peradilan pidana semata. Masalah utama bukanlah konstruksi kelembagaan fisik-

instrumental tapi konstruksi kebudayaan yang mendominasi berjalannya hubungan sosial dalam Lapas yang penuh diversitas.

Konstruksi kebudayaan disatu sisi memberikan pemahaman secara tradisional bahwa Lapas adalah tempat penghukuman pelanggar hukum atas dasar vonis hakim sesuai proses peradilan, di sisi lain mengangkat isu Lapas sebagai arena sosial dinamis yang terdiri beragam jaringan dan hubungan sosial yang saling mempengaruhi dalam kesehariannya. Analisa jaringan sosial diperlukan menelusuri budaya menyimpang dalam Lapas, dan menjadi fokus utama dalam tulisan ini.

Analisa jaringan sosial memberikan pemahaman, menunjukkan penggunaan jaringan dalam ruang lingkup luas. Jaringan sosial dapat digunakan atau dimanfaatkan sekelompok masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Hubungan-hubungan sosial terbentuk didalamnya tidak semata-mata hubungan antar individu tapi melampaui batas-batas geografis dan garis keturunan dalam rangka *survival* menghadapi sulitnya lingkungan atau kehidupan yang harus dilakukan.

Dalam salah satu studi jaringan sosial, Stack (1975) menggambarkan pentingnya jaringan sosial sebagai sarana adaptasi kolektif terhadap tekanan hidup di perkotaan. Stack menjelaskan terbentuknya jaringan sosial merupakan bentuk-bentuk relatif penting bagi keluarga-keluarga kulit hitam menghadapi tekanan sosial, kemiskinan, pengangguran serta keterbatasan akses sumber daya ekonomi

langka. Keluarga kulit hitam mengembangkan jaringan distribusi pertukaran barang dan jasa melalui hubungan-hubungan kooperatif. Mereka mengembangkan pola-pola kehidupan bersama memelihara dan menguatkan secara intensif jaringan kekerabatan kelangsungan hidup (Stack, 1975).

Jaringan sosial juga dimanfaatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang ada dalam kondisi pemenjaraan atau dikenal dengan masyarakat narapidana (*inmate society*) dalam rangka *survive* selama menjalani masa penghukuman di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sudah menjadi rahasia umum hubungan-hubungan sosial di Lapas dilandasi jaringan sosial antara sesama narapidana dan petugas dalam rangka menjaga keteraturan, ketertiban dan keamanan Lapas. Jaringan sosial dipergunakan sebagai strategi petugas dan narapidana (*prison community*) mengatasi berbagai problema yang dihadapi sehari-hari baik di dalam maupun di luar kamar dalam Lapas.

Pelaksanaan Penghukuman: Mengaktifkan Jaringan Sosial

Interaksi rutin narapidana dan petugas dalam Lapas memungkinkan timbulnya kesepakatan-kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk saling memahami kebutuhan masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari narapidana jarang mematuhi pengaturan formal secara mutlak tapi melakukan interpretasi, improvisasi dan inovasi dalam menjalankan kehidupan sosial di Lapas. Keterbatasan Lapas

menyediakan sumber daya mendorong penghuni Lapas mengembangkan jaringan pertukaran barang dan jasa, melalui hubungan-hubungan kooperatif diantara semua pihak. Penghuni mengembangkan pola-pola kehidupan bersama, memelihara dan menguatkan jaringan sosial diantara mereka. Jaringan ini selalu diaktifkan, digunakan atau dimanfaatkan untuk mencapai tujuan serta kepentingan tertentu, terbentuk tidak semata-mata berlandaskan hubungan individual, tapi melampaui batas-batas geografis dan garis keturunan. Oleh karena itu praktek pengambilan keputusan di Lapas dilandasi dan didukung keberadaan jaringan sosial, tidak melulu mengandalkan sistim dan aturan formal baku. Jaringan sosial menjadi wadah menampung dan menjalankan aspirasi yang disepakati kedua belah pihak.

Hubungan-hubungan sosial dalam jaringan tidak terjadi secara kebetulan tapi menunjukkan suatu keteraturan, bukan semata konstruksi kelembagaan, tapi konstruksi sosiologis yang memaknai apa itu vonis hakim, siapa itu narapidana, bagaimana cara menjalankan atau menghabiskan masa hukuman, dan siapa saja yang dilibatkan. Vonis hakim memang bisa saja membatasi gerak para terdakwa atau terpidana, tapi bukan berarti pelaksanaan hukuman penjara mengekang kebebasan aktivitas narapidana. Meski di balik tembok penjara, muncul pertentangan kultur petugas dan penghuni tapi kedua kultur tersebut saling menyesuaikan satu sama lain, tidak bersifat memaksa

sebagaimana kehidupan sosial dalam penjara tradisional.

Jaringan sosial merupakan inti utama kehidupan sosial dalam Lapas meski Lapas mempunyai aturan-aturan sendiri terkait pengaturan-pengaturan rutin, mulai hubungan sesama narapidana, petugas maupun keluarga. Ciri ini menjadikan individu sebagai pusat analisis, dan pada posisi ini, struktur, pranata atau bahkan kebudayaan merupakan hasil konstruksi terus menerus individu untuk memenuhi kebutuhan hidup (Moore: 1983). Saling mempengaruhi berlangsung diantara mekanisme formal dan aturan informal sebagaimana praktek sehari-hari di Lapas. Pelaksanaan kompetitif prosedur formal dan informal berjalan dalam satu lingkungan sosial tanpa saling bertentangan meskipun secara substantif terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya.

Jaringan sosial ini menggambarkan ikatan-ikatan sosial, hubungan-hubungan, kekuatan hubungan antar sesama penghuni maupun petugas karena mereka memainkan peran penting dalam kehidupan di Lapas. Menurut Mitchell (1969) jaringan sosial merupakan seperangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk diantara sekelompok orang, karakteristik hubungan-hubungan tersebut dipergunakan menginterpretasi motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat termasuk dimensi-dimensi terselubung (*hidden dimensions*) didalamnya.

Jaringan sosial merupakan pengelompokan yang terdiri sejumlah orang, sedikitnya tiga

orang yang mempunyai identitas dan dihubungkan satu dengan lain melalui hubungan-hubungan sosial, sehingga hubungan-hubungan sosial itu dapat dikelompokkan sebagai kesatuan sosial. Hubungan-hubungan sosial dalam jaringan sosial tidak terjadi secara acak tapi menunjukkan suatu keteraturan yang jelas (Mitchel, 1969). Berdasarkan keteraturan itu maka dalam *jaringan sosial terkandung struktur sosial* berupa pola-pola yang relatif bertahan lama dalam rangkaian hubungan-hubungan sosial, aturan-aturan rekrutmen, posisi-posisi sosial, dan saling keterhubungan dalam posisi sosial.

Seseorang yang memiliki mobilitas cukup baik dalam mengadakan hubungan-hubungan sosial, berarti ia mempunyai sejumlah jaringan dimana orang tersebut memasuki sejumlah pengelompokan dan status sosial sesuai waktu, ruang, situasi dan kebutuhan serta tujuan yang akan dicapai. Keanggotaan seseorang dalam jaringan bersifat fleksibel dan dinamis. Seseorang memasuki jaringan sosial berbeda sesuai fungsi, berarti ia memasuki struktur sosial berbeda pula. Tidak terletak semata-mata pada atribut para pelaku, tetapi mengacu pada karakteristik dan pola-pola hubungan mereka di dalam jaringan, untuk memahami dasar atau latar belakang perilaku mereka (Mitchell, 1969).

Barry Wellman (1983) menambahkan terdapat miskonsepsi pemahaman tentang jaringan sosial. Analisis jaringan hanya sekedar dilihat sebagai metode atau metafor saja. Analisis jaringan hanya dipandang sebagai kantong

istilah-istilah dan tehnik-tehnik. Wellman (1983) mengatakan analisis jaringan sebagai pendekatan ilmiah itu luas dan bukan sekedar sekumpulan metode sempit. Analisis ini mendalami bagaimana properti-properti struktural mempengaruhi tingkah laku melebihi pengaruh preskripsi-preskripsi normatif, atribut-atribut personal dan hubungan diadik, lalu mempelajari bagaimana pola-pola ikatan dalam suatu jaringan menyediakan kesempatan-kesempatan dan batasan-batasan signifikan; mempengaruhi akses orang-orang dan institusi-institusi terhadap sumber daya informasi (*information*), kekayaan (*wealth*) maupun kekuasaan (*power*).

Aktifnya jaringan sosial dalam Lapas dan Rutan menandakan adanya kepentingan-kepentingan dalam arena sosial, bergantung pada konteks-konteks sosial tertentu. Pengaturan lokal (*self-regulation*) dan ketaatan aturan memaksa keikutsertaan terhadap aturan tersebut. Jaringan sosial dalam Lapas merefleksikan struktur sosial sebagai rangkaian hubungan antara individu-individu tertentu yang secara nyata ada dan konkrit (Brown, 1980) ditentukan konteks-konteks sosial dimana tindakan itu diwujudkan. Struktur-struktur sosial ini tidak berdiri sendiri tetapi bersumber dari kebudayaan yang menuntun anggota-anggotanya berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, kebudayaan bisa dipandang sebagai *seperangkat model-model pengetahuan atau pedoman* tentang: pertama, bagaimana mengorganisasikan perilaku atau tata kelakuan. Kedua, untuk

memahami diri mereka sendiri dan orang lain, dan ketiga, untuk memahami dunia dimana mereka hidup (Ruddy Agusyanto, 2007). Studi-studi jaringan sosial menunjukkan penggunaan jaringan sosial beragam dalam ruang lingkup luas (seperti yang dilakukan Carol B Stack (1975), Kartini Syahrir (1995), Ahmad F. Saifuddin (1992).

Begitu pula penghuni Lapas mengaktifkan dan memanfaatkan jaringan sosial agar dapat *survive* melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan vonis hakim. Mereka membentuk ikatan-ikatan sosial dengan sesama dan petugas, demi tercapainya kebutuhan dan kepentingan bersama. Timothy J Rowley (1997) melanjutkan analisis jaringan sosial tidak saja menganalisis tingkah laku, sikap dan kepercayaan-kepercayaan individual, tapi fokus pada bagaimana interaksi-interaksi ini menyatakan suatu kerangka atau struktur yang dapat distudi dan dianalisis secara benar. Fokus utama analisis ada pada interdependensi para aktor dan posisi mereka dalam jaringan, yang mempengaruhi tingkah laku, kesempatan-kesempatan dan keterbatasan-keterbatasan. Di Lapas peran para aktor bisa dilakoni oleh narapidana, petugas maupun masyarakat luas berdasarkan ikatan jaringan kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

Karakteristik Sosial Lapas: Beberapa Studi

Goffman (1962) awalnya menguraikan karakteristik sosial penjara tradisional dengan ciri bangunan fisik tembok tinggi, penuh keseragaman dan tertutup. Goffman menguraikan karakteristik lingkungan penjara

tradisional sama dengan rumah sakit jiwa dan organisasi militer sebagai satu instansi total (*total institution*) yang menampung dan mengatur hidup orang banyak secara seragam. Goffman memberi gambaran penjara sebagai sesuatu yang konvensional, klasik, tertutup, terkurung, berisi peraturan ketat, diawasi secara ketat, terasing dari kehidupan masyarakat, segala sesuatu dilakukan dengan orang sama dibawah jadwal ketat dan kekuasaan baku.

Irwin & Cressey (1964) memunculkan karakteristik lembaga penghukuman dengan konsep tentang *prison culture*, *inmate culture*, bermacam perilaku penghuni dalam kondisi pemenjaraan. Finkelstein (2003) mendalami kebudayaan penjara (*prison culture*) yaitu pengalaman spesifik pegawai penjara membentuk sistem nilai sendiri dalam memperlakukan narapidana (*prison rules*), dan sebaliknya narapidana mempunyai nilai sendiri menghadapi petugas maupun sesama mereka sendiri (*rules of relationship*). Lorne A Rhodes (2001) menambahkan studi penjara banyak dilakukan tetapi belum mengeksplor penjara sebagai tempat sentral *the exercise of disciplinary power*, literatur lebih membahas *prison industrial complex* (Lorne A Rhodes, 2001).

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pemenjaraan di Indonesia telah berlangsung hampir empat dekade, menjadi saksi pasang surutnya kehidupan di negeri ini, dahulu dikenal dengan sebutan penjara. Lapas merupakan cerminan kebijakan politik pemerintah pada tiap masa. Di masa

pemerintahan kolonial misalnya penjara dijejali pejuang Indonesia yang dianggap musuh, hampir semua pemimpin perjuangan pernah merasakan menjadi tahanan termasuk Proklamator Soekarno-Hatta.

Bambang Purnomo dalam Sujatno (2008) menambahkan pemenjaraan dalam Lapas bisa membawa dampak destruktif bagi penghuni berupa prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme. Proses akomodasi sistem nilai petugas dan narapidana, disatu sisi narapidana menginginkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi secara maksimal, disisi lain petugas pengamanan atau penjagaan berkepentingan tugasnya selalu dalam keadaan aman. Kedua belah pihak melakukan upaya saling tukar kepentingan. Kebutuhan ini bersifat manusiawi, secara laten (terselubung) terus mendesak selalu dipenuhi, akhirnya timbullah pemenuhan kebutuhan dengan cara-cara yang “tidak normal” (Sujatno, 2008).

Budaya menyimpang di Lapas bertumbuh makin besar bila jumlah narapidana dalam Lapas penuh sesak, meningkatkan pelanggaran-pelanggaran aturan dan penyimpangan penghuni Lapas, disamping sikap dan perilaku petugas penjara yang ikut-ikutan menumbuh-suburkan perilaku pelanggaran tersebut (Sudirman, 2007). Masuknya penghuni dengan beragam jenis kejahatan memberi bentuk relasi baru (budaya menyimpang) dalam hubungan petugas dan narapidana. Kedekatan hubungan petugas dan narapidana membuat interaksi petugas dan narapidana saling membutuhkan sekaligus memanfaatkan. Relasi-relasi ini mendasari

strategi pemenuhan kepentingan timbal-balik petugas sebagai pengelola dan narapidana sebagai penghuni. Kiran Bedi (2003) menjelaskan adanya relasi sosial Lapas yang berlangsung antara petugas dan penghuni. Relasi sosial Lapas ini salah satunya terbentuk dan berakar dari birokrasi penjara.

Kondisi buruk dan korup dalam penjara juga berlangsung di beberapa negara lain seperti di India, dikemukakan Kepala Penjara Tihar, Kiran Bedi (2003) bahwa ada tampilan tersembunyi dalam penjara yang hanya diketahui “orang dalam” seperti pemerasan, korupsi, jaringan penyaluran narkoba, pemukulan, pembiaran-pembiaran serta perawatan kesehatan minim. Relasi sosial Lapas salah satunya terbentuk dan berakar dari birokrasi penjara yang terkenal dengan praktek mengulur-ulur waktu. Ada saat-saat dimana petugas mempunyai kehidupan tak menentu, tak memiliki perlindungan dari ancaman gembong-gembong narapidana, sehingga beberapa petugas mencari jalan aman bekerja sama dan memberi fasilitas pada gembong-gembong tersebut. Uang, ancaman, kekuasaan, kerjasama, fasilitas, berjalan sendiri-sendiri menyelesaikan dan membereskan persoalan mereka, diwarnai ketegangan, kesengitan dan kengerian. Ini merupakan pelanggaran sub-kultur kriminal, semua terlibat didalamnya, tidak ada orang dibenci dan tidak ada pula yang dihormati.

Budaya menyimpang dalam Lapas dapat dikatakan menjadi sumber kemunafikan, manipulasi, bahkan Lapas dianggap sebagai sekolah tinggi kejahatan (*school of crime*).

Dalam kaitan ini Cressey dan Irwin dalam Sudirman (2007) menguraikan bahwa tipe kebudayaan yang berkembang dalam Lapas adalah timbulnya sub-kultur penjara (*prison sub-culture*), sub-kultur kriminal (*criminal sub-culture*) dan sub-kultur sah (*legitimate sub-culture*). Banyak pihak meyakini budaya Lapas di Indonesia tak beda jauh dengan sub kultur kriminal (*criminal sub-culture*). Potensi penyimpangan dalam Lapas banyak dipengaruhi oleh tingkat *overcapacity* dan pendekatan keamanan (*security*) yang digunakan. Makin *overload* sebuah Lapas maka makin cenderung banyak ditemui penyimpangan perilaku. Demikian pula semakin ketat dan represif pendekatan keamanan, maka makin tinggi pula berlakunya penyimpangan (*criminal subculture*) diantara petugas dan narapidana. (Sudirman, 2007).

Analisa Jaringan Sosial Formal

Kebijakan Lapas mengikutsertakan narapidana dalam tugas operasional administratif setidaknya ikut membentuk jaringan sosial formal antara petugas dan napi maupun diantara sesama napi. Dalam praktek, status hubungan narapidana dan petugas membentuk jaringan formal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepentingan di Lapas. Dikatakan jaringan formal karena mulai dari perekrutan sampai jadi pemuka (*tamping*) tak diambil begitu saja, tapi harus melewati penyaringan, pewarisan dan rekomendasi pendahulunya. Jaringan sosial formal adalah gambaran jenis jaringan sosial struktural karena mencerminkan hubungan-hubungan sosial dalam bidang kerja tertentu, bisa juga

berjenis jaringan sosial kategorikal dalam rangka adaptasi dan resistensi.

Beberapa hasil penelitian mengemukakan bahwa jaringan sosial adalah suatu alat yang digunakan ketika orang-orang berada dalam tekanan-tekanan baik mental, fisik dan sosial-ekonomi. Boswell menyatakan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya sangat penting ketika individu-individu atau keluarga menghadapi tekanan besar atau dalam keadaan kritis yang tidak dapat diatasi sendiri, sehingga memerlukan bantuan tambahan dari pihak lain untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Senada dengan itu, pendapat Corner (1988), Stack (1982) dan Saifuddin menguatkan bahwa bantuan pihak lain sebagaimana maksud Boswell diperlukan sebagai strategi adaptasi yang bisa ditempuh penduduk miskin untuk tetap menjaga konsistensi kelangsungan kehidupannya. Begitu pula di Lapas, jaringan sosial diperlukan mempertahankan adaptasi dan kelangsungan kehidupan dalam Lapas.

Jaringan sosial formal antara petugas atau narapidana menampilkan hubungan timbal balik (diadik) dalam suatu jangkauan yang membentuk kesatuan sosial tertentu. Ada sumber daya berbeda terutama antara petugas yang mempunyai kebebasan bergerak di luar lembaga, dan narapidana yang mempunyai keterbatasan bergerak karena statusnya di dalam lembaga. Tahapan hubungan timbal balik ini semakin menjadi menguat dan bertahan terutama pada tingkat kepadatan relatif tinggi.

Dalam kurun waktu tertentu, hubungan-hubungan sosial ini relatif bersifat tetap, berakhir setelah narapidana selesai menjalani pidana. Jaringan sosial formal ini dikenal dengan istilah patron-klien. Dalam hubungan patron-klien menurut Koentjaraningrat, Marcess Mauss, Bronislaw Malinowski berdasar pada *principle of reciprocity* atau asas timbal balik.

Analisa terhadap prinsip repositas dalam jaringan sosial formal dapat menjadi landasan menelusuri budaya menyimpang dalam Lapas (diagram 1), tentunya disesuaikan dengan tempat, waktu dan konteksnya.

Analisa Jaringan Sosial Informal

Jaringan sosial informal yaitu jaringan yang dibentuk oleh hubungan-hubungan informal antar petugas dan narapidana, baik bersifat persaudaraan, pertemanan, kepentingan, perasaan, maupun kebutuhan tertentu. Seiring keberadaan petugas dan napi, maka jaringan informal terjalin begitu kental dan terbatas. Narapidana mencari kelonggaran dengan mencari tempat berlindung seperti untuk membela diri dan menitipkan barang tertentu. Sedangkan beberapa petugas berusaha memenuhi kebutuhan fisik dan non-fisik dari narapidana. Jaringan informal dimanfaatkan narapidana sebagai tempat mengadu, karena berbagai perlakuan petugas lain atau napi tertentu, atau menghindari hukuman pengasingan karena masalah utang dan perselisihan. Sedangkan bagi petugas, jaringan sosial informal bisa menjadi tempat pertukaran informasi status narapidana terkait masa penghukuman. Jaringan sosial informal ini

tidak harus mengikuti jaringan formal yang ada, tetapi bisa berjalan sendiri, dilakukan narapidana yang memang umumnya mempunyai kekuatan uang, jabatan, kedekatan, dan dapat membuat hubungan atau interaksi yang luas di Lapas. Jaringan sosial informal berulang kali dimanfaatkan menjadi sarana tempat berlindung, pertukaran kebutuhan dan memperoleh informasi. Ada batas area di Lapas yang boleh dikunjungi dan tidak, hanya diketahui oleh “orang dalam” seperti setoran, peredaran obat, perkelahian,

Analisa Jaringan Sosial & Lembaga Dinamis

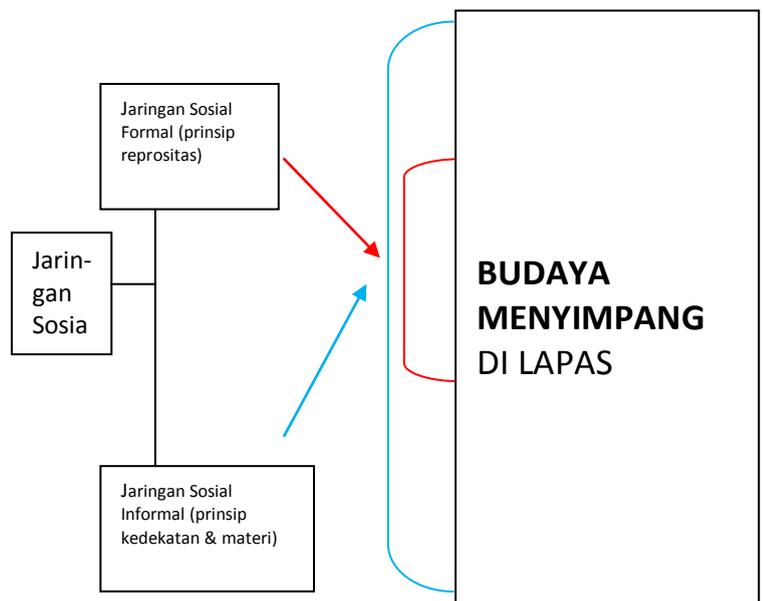
Analisa jaringan sosial formal dan informal dalam menelusuri budaya menyimpang di Lapas tidak menjamin pengamanan dan pembinaan dalam Lapas berlangsung aman dan berjalan sesuai aturan. Tetap saja ada resiko tinggi bila salah mengidentifikasi atau memulai titik *start* dalam menelusuri berbagai jaringan yang ada di dalam Lapas, karena Lapas adalah arena sosial dinamis bukan lagi institusi penghukuman tradisional.

Posisi Lapas sudah waktunya tidak dipahami sebagai lembaga yang statis, diam dan tak bergerak. Kehidupan sosial dinamis individu narapidana selalu melakukan tafsir, modifikasi dan inovasi saat berinteraksi selama menjalankan masa hukuman di Lapas. Keterbatasan Lapas menyediakan berbagai sumber-daya mendorong narapidana

sampai pemenuhan dan pangabaian hak narapidana.

Analisis terhadap prinsip kedekatan hubungan dan materi dalam jaringan sosial informal, dapat menjadi pondasi menelusuri lebih jauh budaya menyimpang dalam Lapas (diagram 1).

Diagram 1. Analisa Jaringan Sosial & Budaya Menyimpang



mengembangkan budaya ketaatan dan budaya menyimpang melalui jaringan sosial formal dan informal. Dengan cara demikian narapidana dan petugas mengembangkan pola-pola budaya agar *survive* selama di Lapas. Sudah waktunya perhatian lebih besar diberikan pada perubahan pola atau budaya menyimpang (revolusi mental) di Lapas karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu cara memperbaiki kesalahan para pelanggarnya.

Daftar Pustaka

- Agusyanto, Ruddy, "Dampak Jaringan Jaringan Sosial dalam Organisasi : Kasus PAM Jaya, DKI Jakarta", *Tesis*, Universitas Indonesia. 1995
- Allen, Harry A dan Clifford E Simonsen, *Corrections In America: An Introduction*, Macmillan Publishing Company, New York USA, 1989.
- Atmowiloto, Arswendo, *Hak-Hak Narapidana*, ELSAM, 1996.
- Barnes, J.A., Network and Political Process, dalam J, Clyde Mitchell (ed), *Social Network in Urban Situations, Analysis of Personal Relationship in Central African Town*, Manchester: Manchester University Press. 1969
- Bedi, Kiran. *It's Always Possible*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia. 2003
- Brown, Radcliffe., *Struktur dan Fungsi dalam Masyarakat Primitif*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementrian Pelajaran Malaysia. 1980
- Direktorat Kehakiman dan HAM RI Direktorat Jendral Pemasarakatan, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasarakatan Buku 1*, Jakarta, 2000.
- Goffman, Erving. *Asylums: Essay on The Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. Chicago: Aldine Publishing Company. 1962.
- Gottlieb, Benyamin H (ed). *Social Networks and Social Support*, London : Sage Publications. 1981.
- Hegmann, Greg, Taking Cars: Ethnography of A Car Theft Ring, dalam Spradley, James. P. & David M McCurdy, *The Cultural Experience: Ethnography in Complex Society*, Science Research Associates (SRA), USA, 1972.
- Leinwald, Gerald, *Prisons*, Pocket Books, New York, 1972,
- Lewis, Oscar., The Culture of Poverty, dalam *Urban Life in Urban Anthropology*, Gmelch George & Walter P. Zenner, ed, New York : St. Martin Press. 1977.
- Martin, Carol, Doing Research in a prison setting, dalam *Doing Criminological research*, Victor Jupp, et.al., Sage Publications, 2000.
- Mitchel, J.C., *Social Network in Urban Situations*, Manchester : Manchester University Press. 1969
- Moore, Sally F. *Law As Process, An Anthropological Approach*. London : Routledge & Kegan Paul Ltd. 1983
- Poloma, Margaret M, Sosiologi Kontemporer, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Rhodes, Lorne A. "Toward an Anthropology of Prisons" dalam *Annual review of Anthropology*, Vol. 20. 2001
- Saifuddin, A.F. "Stability & Change : A Study of The Social Network and Household Flexibility Among The poor of Jakarta Indonesia," *Disertasi*, University of Pittsburg. 1990
- Scott, John., *Social Network Analysis*, London : Sage Publications. 1991.
- Stack, Carol B, *All Our Kin, Strategies for Survival in a Black Community*, Harper Paperback Publications. 1975
- Sujatno, Adi, *Pencerahan Dibalik Penjara: Dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Penerbit Teraju, Jakarta, 2008.
- Sudirman, Didin. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan Dalam Sistim Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (Pusjianbang) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2007
- Syahrir, Kartini, *Pasar Tenaga Kerja Indonesia, Kasus Sektor Konstruksi*, Jakarta : Grafiti. 1990

Wellman, Barry & Berkowitz, S.D (ed)., *Social Structures, A Network Approach*, Cambridge University Press. 1988

Wolfe, Alfin. W., *Social Network An International Journal of Structural Analysis*, Switzerland :Elsevier Sequoia. 1978

